

# Makalah

## WORKSHOP Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan

*Yogyakarta, 13 - 15 November 2007*



### Mengklaim Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Yustisiabilitas Hak Atas Pendidikan

*Oleh :*

*A. Patra M. Zen*

*Vice Chairperson Indonesian Legal Aid Foundation*



# Mengklaim Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Yustisiabilitas Hak Atas Pendidikan

Patra M Zen

# Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar 2006

---

## **Di Indonesia**

**SD : 94 persen.**

**SMP/MTs : 62 persen.**

**(Sumber: Litbang Kompas)**

**Di Kota Malang per Oktober 2006, data Dinas Pendidikan memperlihatkan angka putus sekolah mencapai 2.438 orang (7-12 tahun); 24.782 anak (13-15 tahun), dan kelompok usia 16-18 tahun mencapai 60.817 anak.**

**Kabupaten Situbondo, per Maret 2006, angka putus sekolah mencapai 71 ribu anak.**

**Di Brebes, angka putus sekolah anak-anak nelayan bahkan meningkat hingga 60 persen, atau sekitar 9.010 anak hingga usia 15 tahun tidak bersekolah lagi (Sumber: Kompas, 16/2/07).**

# Contoh kasus

---

Heryanto (13), siswa kelas VI SDN di Kota Garut, sempat mencoba bunuh diri karena malu tak mampu membayar alat peraga prakarya Rp 2.500 karena sang orang tuanya yang buruh kasar tak mempunyai uang.

Bunyamin (17) siswa kelas 2 SMK di Tegal tewas gantung diri ditiang dapur rumahnya, diduga karena mampu membayar SPP Rp 40.000 per bulan. Orang tua almarhum merantau ke Jakarta sebagai penjual nasi goreng.

# Dapatkah si anak atau keluarganya mengklaim hak atas pendidikan?

---

Yustisiabilitas hak Ekosob:

Hak atas pendidikan sama dengan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan. Keduanya adalah hak asasi manusia.

Karenanya, terhadap korban pelanggaran hak asasi ini, mesti dimungkinkan untuk remediesnya, termasuk penyelesaian masalah secara hukum.

# Keputusan Yudikatif Mengikat Eksekutif

---

Contoh:

Dalam sengketa pilkada, pengadilan menetapkan pasangan pemenang pilkada, selanjutnya Mendagri mengikuti hasil putusan tersebut

Dalam putusan pengadilan, hakim memutuskan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar cuma-cuma, maka pemerintah pun wajib mengikuti putusan tersebut

# Contoh putusan pengadilan: hak atas pekerjaan

---

- Ketua Majelis Hakim Manis Soejono pada 31 Juli 2000 di PN Jakarta Pusat, dalam putusan yang memeriksa perkara gugatan tukang becak terhadap Gubernur DKI Sutiyoso, menyatakan bahwa penggugat dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai penarik becak di jalan-jalan pemukiman dan pasar. Kala itu, tidak kurang 139 koordinator Pangkalan becak mewakili 5.000 tukang becak di wilayah DKI Jakarta menggugat kebijakan Gubernur DKI yang melarang beroperasinya becak di wilayah di ibu kota. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menghukum tergugat untuk menyediakan ruang dan jalur khusus untuk beroperasinya becak di jalan.

# Contoh putusan pengadilan: hak atas perumahan

---

- Dibidang hak atas perumahan, salah satu contoh, putusan Majelis Hakim yang diketuai Fritz John Polnaja di PN Jakarta Timur menyatakan tindakan pemerintah kota Jakarta Timur membongkar dan mengusir paksa warga masyarakat di RT 04 RW 02 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar Jakarta Timur merupakan tindakan melawan hukum. Pada 21 Oktober 2004, para tergugat yakni Walikota Jakarta Timur dan Camat Makassar divonis bersalah. Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan jika tidak dilaksanakan, maka Walikota dan Camat akan dikenakan sanksi Rp 10 juta tiap hari sampai putusan berikutnya.

## Agenda kerja:

---

- Melahirkan advokat-advokat yang mendorong perwujudan yustisiabilitas hak ekosob
- + Butuh waktu yang tidak sebentar, agar hak masyarakat dan organisasi mengajukan gugatan perwakilan dan penggunaan *standing* organisasi (lihat UU No. 23/1997)



---

- Terima Kasih